

**STRATEGI PENGUATAN DEMOKRASI AGONISTIK PADA
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
(STUDI PADA BEM FKIP UNS)**

Ismi
Universitas Sebelas Maret
Email : ismiismi005@gmail.com

Dr. Drs. Machmud Al Rasyid, S.H.,M.Si
Universitas Sebelas Maret
Email : machmudalrasyid@staff.uns.ac.id

Erna Yuliandari, SH., MA
Universitas Sebelas Maret
Email : ernayuliandari@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan strategi untuk menguatkan demokrasi agonistik mahasiswa dalam lingkungan BEM FKIP UNS; (2) Mendeskripsikan hasil dari penguatan demokrasi agonistik terhadap kualitas demokrasi di lingkungan BEM FKIP UNS dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, serta analisis dokumen. Pengambilan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Lokasi penelitian pada BEM FKIP UNS Kabinet Alterasi 2023. Pengujian validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Hasil penelitian yang didapatkan adalah sebagai berikut. *Pertama*, BEM FKIP UNS melaksanakan penguatan demokrasi agonistik melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut seperti Rapat Harian Terbatas (RHT), pembinaan di masing-masing kementerian, LKMM-D, dan kegiatan kepanitiaan, bentuk penguatan yang dilakukan adalah dengan menciptakan kontestasi dan perdebatan yang sehat, menciptakan kebebasan dan kesetaraan dalam berpendapat, serta adanya kepastian terhadap pluralisme. *Kedua*, hasil dari penguatan demokrasi agonistik terhadap kualitas demokrasi di lingkungan BEM FKIP UNS yaitu dapat meningkatkan partisipasi aktif dari anggota dan pengurus organisasi, menumbuhkan kemampuan untuk mengelola konflik secara melembaga, dan mampu bersikap terbuka terhadap adanya perbedaan dan menjunjung tinggi nilai toleransi dimana hal ini menunjukkan adanya keterampilan kewarganegaraan dan sikap kewarganegaraan dalam diri anggota dan pengurus BEM FKIP UNS.

Kata Kunci: *Demokrasi, Demokrasi Agonistik, Pendidikan Kewarganegaraan, Konfrontasi*

PENDAHULUAN

Indonesia telah merumuskan tujuan dan fungsi pendidikan nasional dalam Undang-Undang Pasal 3 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional yang berbunyi bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bagas dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, mencapai warga negara yang demokratis, kritis terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta bertanggung jawab terhadap dirinya, lingkungan, bangsa dan negaranya.

Demi mencapai warga negara yang demokratis tidak hanya melalui pendidikan formal saja, melainkan dapat melalui organisasi kemahasiswaan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Nastiti (2023) bahwa organisasi kemahasiswaan adalah salah satu wadah yang tepat untuk membantu proses pembentukan sikap demokratis. Eksistensi dari keikutsertaan mahasiswa dalam organisasi mahasiswa adalah agar dapat menerapkan nilai-nilai demokrasi seperti keberanian dalam mengemukakan pendapat, berani mengambil keputusan, mampu memecahkan masalah, dan dapat melatih jiwa kepemimpinan. Hal ini akan melahirkan insan yang mampu berdaya pikir kritis terhadap segala isu-isu sosial, mengelola konflik, dan mampu mengambil langkah yang tepat untuk menanggapi. Salah satu organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan sikap dan keterampilan demokratis adalah Badan Eksekutif Mahasiswa.

Salah satu organisasi dalam

lingkungan Universitas Sebelas Maret adalah Badan Eksekutif Mahasiswa di tingkat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (BEM FKIP). BEM FKIP UNS memiliki visi untuk merevitalisasi BEM FKIP sebagai rumah yang kompeten dalam mewujudkan eskalasi perjuangan yang aktif, responsif, dan konstruktif, serta memanifestasikan BEM FKIP sebagai rumah kolaboratif kebaikan yang sinergis dan berdampak positif bagi KBM FKIP dan Indonesia. Dan terdapat enam misi utama yaitu ingin mewujudkan BEM FKIP sebagai ruang keluarga, ruang kesma, ruang juang, ruang sosial, ruang relasi, dan ruang minat bakat.

Dalam menjalankan visi dan misi yang telah disusun, tidak menutup kemungkinan untuk bertemu dengan beragam persoalan seperti perbedaan sudut pandang dan kepentingan anggota atau kelompok yang akan menghasilkan konflik, baik dengan sesama anggota organisasi maupun dari luar anggota organisasi. Seperti pendapat dari Suryani (2023) bahwa di dalam lingkungan organisasi akan selalu bertemu dengan adanya perbedaan pendapat, bahkan karena adanya perbedaan pendapat tersebut terjadi perdebatan yang berujung kesalahpahaman antar anggota organisasi, sehingga menyebabkan perpecahan. Perpecahan juga bisa terjadi karena adanya ketidaksepakatan tentang tujuan yang akan dicapai atau bagaimana cara yang ingin dilakukan

untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, dimana dalam proses pengambilan keputusan, seringkali muncul konflik antar anggota organisasi BEM FKIP UNS. Beberapa anggota merasa bahwa keputusan yang diambil tidak adil atau tidak mempertimbangkan kebutuhan anggota. Salah satu contohnya adalah tentang penyelenggaraan acara-acara besar di BEM FKIP UNS. Yang mana terdapat anggota yang merasa pendapatnya tidak didengarkan saat memberikan usulan atau ide. Kemudian, terdapat keputusan yang kurang menguntungkan bagi kementerian terkait pembagian alokasi dana. Kementerian Keuangan sudah membagi alokasi anggaran semaksimal mungkin, namun masih ada anggota yang tidak terima karena memang kebutuhan untuk kegiatan atau program kerja itu sangat besar.

Selain itu, terdapat permasalahan mengenai kebijakan di internal organisasi, tentang tata tertib dan budaya di BEM FKIP UNS. Banyak mahasiswa yang menginginkan kebijakan yang dibuat agar lebih fleksibel, namun ada mahasiswa yang menginginkan kebijakan lebih terstruktur dan ketat seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi dan seringkali berakibat kepada konflik di internal organisasi. Ketegangan ini berasal dari pengurus senior yang telah lama bergabung dan pengurus baru yang

baru bergabung. Pengurus senior mungkin merasa mempunyai hak yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, karena memang sudah menjadi peraturan yang ada secara turun temurun, namun pengurus baru merasa tidak cukup didengar atau ingin membuat kebijakan baru sesuai dengan organisasi yang diikuti sebelumnya.

Jika dilihat dari perspektif pendidikan kewarganegaraan, maka dalam situasi seperti ini dibutuhkan sikap demokratis dari setiap mahasiswa. Menurut Winataputra dan Budimansyah (2012) Pendidikan kewarganegaraan adalah proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar dalam proses penyiapan warga negara tersebut. Kedudukan PKn dalam proses demokratisasi adalah dalam rangka transformasi nilai-nilai demokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Alexis de Toqueville (dalam Wahab, A. A. dan Sapriya, 2011) bahwa betapa pentingnya proses pembelajaran bagi suatu generasi untuk mewarisi pengetahuan, keterampilan, dan watak atau sifat karakter pribadi maupun publik demi tegaknya demokrasi konstitusional.

Demokrasi agonistik hadir dengan memberikan penghargaan terhadap perbedaan dan memberikan perlindungan terhadap hak individu

dan menjamin keikutsertaan mereka dalam berbagai even demokrasi (Sukri, 2016). Dalam demokrasi agonistik adanya 'ketegangan' bukan untuk dihilangkan melainkan 'dijinakkan', sehingga bisa menjaga elemen konflik yang baik bagi politik demokrasi sambil mengontrol elemen yang destruktif. Menurut Hanif dalam (Jehalut, 2020) agonisme mengacu pada kontestasi antara dua pihak yang berlawanan, bukan untuk saling bermusuhan melainkan untuk melindungi dan mengakui keabsahan posisi masing-masing. Singkatnya, visi Mouffe tentang pluralisme agonistik menyerukan pluralitas subjek yang penuh semangat untuk bersuara, mengajukan tuntutan, dan didengarkan, dalam tatanan simbolik bersama (Harvey, 2012).

Persoalan krusial dalam politik demokratis adalah bagaimana membangun perbedaan kita/mereka yang bersifat konstitutif dalam politik dengan cara yang sesuai dengan pengakuan pluralisme. Model demokrasi agonistik ingin meradikalisasi konflik, antagonisme, dan ketegangan sosial itu sekaligus mentransformasikannya dengan cara-cara yang non-destruktif (Jehalut, 2020). Konflik dalam masyarakat demokratis tidak dapat dan tidak boleh diberantas karena kekhususan demokrasi modern terletak pada pengakuan dan legitimasi konflik. Dalam demokrasi agonistik, tujuan utamanya bukanlah mencapai konteks final dan universal,

melainkan menciptakan kondisi bagi konteks konfliktual. Konfrontasi agonistik dianggap penting untuk mewujudkan demokrasi yang hidup, di mana berbagai bentuk pengakuan kewarganegaraan diakui sebagai bagian dari politik demokratis.

Berdasarkan permasalahan di atas menunjukkan penting bagi mahasiswa untuk dapat menguatkan demokrasi agonistik dalam kehidupan berorganisasi, agar mahasiswa dapat mengelola perbedaan dengan baik, dengan adanya pengelolaan terkait permasalahan yang terjadi maka akan menumbuhkan sikap demokratis dalam lingkungan organisasi. Ketegangan antar kelompok atau individu bisa mengarah pada konflik, dan apabila dikelola dengan baik dapat memperkaya proses demokratis dalam organisasi BEM FKIP UNS. Oleh karena itu, penting untuk memahami strategi yang dapat diterapkan untuk mengelola konflik ini secara konstruktif. Hal ini dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia serta untuk membentuk warga negara yang cerdas, kritis, dan rasional.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Tia Athiyyah (2018) dengan judul "Pengaruh Organisasi Kemahasiswaan Terhadap Peningkatan Kematangan Demokrasi Mahasiswa" ditemukan bahwa perlu peningkatan sikap demokratis mahasiswa. Mahasiswa yang aktif dalam organisasi akan memiliki sikap

demokrasi yang matang. Sikap kematangan demokrasi mahasiswa terlihat dari kebebasan, kreativitas, keterbukaan, kebersamaan, toleran, tanggungjawab, saling menghormati, saling menghargai, partisipasi, kritis, dan argumentative. Selain itu, terdapat penelitian yang telah dilakukan oleh (Koutsouris et al., 2022) menunjukkan bahwa pendidikan agonistik penting untuk diwujudkan dalam lingkungan akademik. Pendidikan Agonistik akan memberi semua siswa kesempatan mengekspresikan pandangan mereka. Lembaga pendidikan dianggap sebagai ruang di mana makna demokrasi dan politik terus di konstruksi ulang. Dan agonis melibatkan pendidikan emosi politik dan menyediakan ruang di mana emosi dapat diartikulasikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data verbal dan tertulis dari perilaku yang diamati (Moleong, 2003). Tujuan dari penelitian deksriptif yaitu untuk menemukan fakta-fakta yang apa danya dan akurat, sehingga akan memberikan gambaran yang faktual dan sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta

yang dimulai pada bulan September 2023 sampai Maret 2024. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan hasil dari pra penelitian yang dilakukan bahwa ditemukan beragam persoalan seperti perbedaan pemikiran, sudut pandang dan kepentingan dari masing-masing pihak yang menghasilkan konflik antagonistic. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu kepada Presiden, Sekretaris Jenderal, Menteri Koordinator, Menteri, Wakil Menteri, dan anggota BEM FKIP UNS. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan studi dokumen. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Hubermas (sebagaimana dikutip Sugiyono, 2021) yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Strategi Penguatan Demokrasi Agonistik Pada Anggota dan Pengurus BEM FKIP UNS BEM FKIP UNS sebagai sebuah organisasi kemahasiswaan akan selalu berhadapan dengan konflik dan perbedaan. BEM FKIP UNS menyikapi perbedaan ide, pemikiran, dan idelogi agar dapat menjadi sebuah terobosan baru demi tercapainya tujuan organisasi. Langkah-langkah yang diambil adalah dengan menciptakan

kontestasi dan perdebatan yang sehat melalui kegiatan-kegiatan di lingkungan organisasi. Dimana berbagai macam opini atau pendapat diekspresikan dan diperdebatkan melalui sebuah forum yang sah, seperti forum Rapat Harian Terbatas (RHT), kemudian kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar (LKMMMD), dan Leadership Training (LT). Kegiatan-kegiatan ini merupakan sebuah forum diskusi yang dilaksanakan untuk memberikan ruang bagi perbedaan pendapat dari setiap mahasiswa dapat tersalurkan. Dan hal ini juga merupakan sebuah pengenalan bahwa konflik dan perbedaan pendapat merupakan sebuah bagian tidak terpisahkan dari demokrasi, dan dapat menjadi alat untuk mencapai pemahaman serta solusi yang lebih baik bagi organisasi.

Menciptakan kontestasi dan perdebatan yang sehat melalui kegiatan di lingkungan organisasi merupakan perwujudan dari demokrasi agonistik. Menurut Sukri (2016) demokrasi agonistik mencoba untuk memanfaatkan adanya pertentangan dan kontestasi sebagai bagian tak terpisahkan dari demokrasi, sehingga konflik dalam konteks demokrasi yang mengedepankan pentingnya penghargaan terhadap hak individu dianggap sebagai hal yang logis. Selain itu, dengan pemberian ruang-ruang diskusi akan melatih anggota

dan pengurus BEM FKIP UNS agar dapat mengeluarkan hasrat, keinginan, dan ide-idenya tanpa mengkerdilkan keinginan dari pihak lain. Sehingga, hal ini akan menciptakan demokrasi yang sehat di lingkungan organisasi, karena dapat mengelola perbedaan melalui ruang-ruang yang sah. Menurut (Mouffe, 2013) setiap individu atau kelompok dapat bertarung satu sama lain, sehingga prinsip demokrasi dapat ditafsirkan sebagai sebuah hegemoni. Dimana organisasi ini mencoba untuk menghadapi konflik dengan sikap terbuka dan melibatkan berbagai perspektif yang ada, yang kemudian mengelola secara konstruktif untuk mencapai keputusan yang lebih baik dan inklusif bagi seluruh anggota dan pengurus.

Selanjutnya, BEM FKIP UNS memberikan kebebasan kepada setiap anggota dan pengurus organisasi untuk menciptakan perubahan. Adanya arena di mana konflik dimungkinkan dan perbedaan dapat dihadapi bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada dominasi oleh kelompok atau individu tertentu, sehingga semua pihak memiliki kesempatan yang sama. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan kesempatan berbicara yang adil dan merata, mendukung partisipasi dari anggota yang lain, dan memberikan kebebasan untuk menciptakan perubahan-perubahan. Menurut (Juru, 2013), hak, kesetaraan, dan kebebasan bukanlah properti yang

hanya dipikirkan dalam jaminan konstitusional semata, tetapi harus dipahami sebagai penanda yang snantiasa mengisi arena perjuangan warga negara sebagai identitas politik. Adanya kebebasan berpendapat juga telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28E (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Selain itu, adanya rapat program kerja di beberapa kegiatan besar seperti Education Festival (Edufest), FKIP Siap Mengabdikan (FSM), LKMM-D, dll telah memberikan dorongan bagi setiap anggota untuk memberikan kritik, ide, dan saran terhadap kegiatan tersebut, sehingga memunculkan argumentasi dari beberapa pihak. Dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap mahasiswa, maka akan menciptakan sebuah hegemoni baru dalam menjalankan roda-roda organisasi di kemudian hari. Ide-ide baru akan muncul, perbedaan akan tercipta, dan akan menumbuhkan semangat demokrasi dalam diri masing-masing individu, dan hal ini sebagai sebuah langkah menuju kebebasan bagi setiap mahasiswa untuk berpendapat. Dengan begitu maka adanya konflik dan pertentangan ide dalam organisasi bukanlah sebuah hal yang mustahil. Hal ini sesuai dengan pendapat Berlin (sebagaimana dikutip Juru, 2013) bahwa merayakan kebebasan adalah sebuah usaha untuk

membuka ruang ekspresi politik dan artikulasi warga negara, karena pada dasarnya kebebasan harus bersuara lebih keras dari tirani. Dengan ini warga negara akan terlibat dalam pemenuhan dirinya sebagai subyek politik yang mempengaruhi ruang publik.

BEM FKIP UNS mengakui bahwa anggota dan pengurusnya terdiri dari berbagai kelompok dengan pandangan, kepentingan, dan identitas yang berbeda. Hal ini akan memungkinkan untuk terjadinya lebih banyak sudut pandang untuk disuarakan dan didengar. Di sini terdapat pengakuan bahwa ide-ide dari setiap anggota BEM FKIP UNS akan selalu dilawan, namun haknya untuk mempertahankan ide tidak boleh dipertanyakan. Artinya disini mengacu pada dua pihak yang saling bersebrangan, namun pada saat yang sama memberikan pengakuan satu sama lain sebagai pihak-pihak yang masing-masing absah dalam memiliki pandangan. Hal ini sesuai dengan pendapat (Sukri, 2016) bahwa demokrasi agonistik hadir dengan memberikan penghargaan terhadap perbedaan dan memberikan perlindungan terhadap hak individu dan menjamin keikutsertaan mereka dalam berbagai even demokrasi.

BEM FKIP UNS belajar dari tahun-tahun sebelumnya untuk lebih mengutamakan penghargaan terhadap adanya perbedaan pendapat, ideologi, dan nilai-nilai dari setiap

mahasiswa. Adanya perbedaan pendapat yang muncul tidak disikapi dengan buruk, melainkan dijadikan sebagai sebuah suasana untuk menciptakan ruang-ruang konflikual yang dapat memberikan kontribusi ide, pikiran, dan nilai-nilai baik untuk kemajuan organisasi. Setiap anak belajar untuk menghargai dan mendengarkan dengan baik apabila ada yang memberikan pendapat, dan juga memberikan apresiasi kepada setiap anggota ataupun pengurus yang berani memiliki ide yang berbeda dengan mereka. Dalam berbagai dokumen di BEM FKIP UNS juga ditemukan bahwa organisasi ini harus senantiasa menjunjung tinggi toleransi, menghargai perbedaan pendapat individual, keputusan dan juga sikap dalam melaksanakan kesepakatan. Menurut (Zamroni, 2013) bahwa kehidupan demokratis akan terwujud apabila setiap warga negara memiliki sifat dan karakter yang mendukung demokrasi, sikap tersebut yaitu seperti memiliki kemampuan untuk memahami perbedaan serta memiliki kemampuan dan keinginan berkomunikasi tentang perbedaan.

Dampak dari Penguatan Demokrasi Agonistik Terhadap Kualitas Demokrasi di Lingkungan BEM FKIP UNS dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan

Hasil dari penguatan demokrasi agonistik di lingkungan BEM FKIP UNS yaitu mahasiswa

terlibat aktif dalam kegiatan diskusi, sehingga mereka lebih berani untuk mengeluarkan pendapat. Wujud partisipasi tersebut adalah keikutsertaan anggota dan pengurus dalam proses diskusi, dimana mahasiswa memberikan masukan maupun sanggahan yang relevan dan menawarkan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Selain itu, mahasiswa BEM FKIP UNS lebih berani untuk menyatakan ketidaksetujuan dan kritik kepada orang lain. Mereka berani untuk mengusulkan perubahan dan inovasi yang dianggap perlu untuk kemajuan organisasi, apabila kebiasaan lama telah dianggap kurang efektif atau tidak sesuai dengan tujuan organisasi. Salah satu perubahan yang terjadi adalah pergantian program kerja SPN (Sekolah Pambaharu Negeri) menjadi LCE yang lebih sesuai dengan tujuan organisasi sekarang. Hasil penelitian Marlina (2021) menunjukkan bahwa optimalisasi organisasi mahasiswa sebagai laboratorium demokrasi digerakkan dalam bentuk aktivitas dan program kerja organisasi demi terciptanya sebuah sikap saling menghargai, berani untuk berpendapat, budaya berdebat dengan sehat, kepemimpinan, kemandirian, tanggung jawab pribadi dan sosial, serta lain sebagainya.

Selanjutnya adalah meningkatnya keterampilan berkomunikasi, public speaking, kepemimpinan, dan berpikir kritis

mahasiswa BEM FKIP UNS. Keterampilan-keterampilan ini merupakan perwujudan dari keikutsertaan mahasiswa dalam setiap kegiatan organisasi, seperti pelatihan untuk berbicara di depan umum, belajar berdiskusi, bertanggung jawab dan cara untuk mengelola konflik dengan cara yang melembaga. Harper dalam (Hidayah & Sunarso, 2018) menyatakan bahwa "... the acquisition of cross-cultural communication skill, the development of carefor other disenfranchised groups, and the pursuit of social justice via leadership and student organization membership).

Selama keberjalanan kabinet Alterasi di tahun 2023 telah mengalami berbagai jenis perselisihan dan perbedaan pendapat dan ide-ide dari mahasiswanya. Penguatan yang dilakukan selama ini adalah untuk mengelola perbedaan tersebut melalui sebuah wadah diskusi, sehingga mahasiswa memiliki kesempatan untuk menyampaikan dan mendengarkan berbagai pandangan dan pemikiran dari pihak-pihak lain melalui ruang yang sah. Menurut Mouffe (sebagaimana dikutip Strömbom & Bramsen, 2022), ketika konflik tidak diberi kemungkinan untuk mempunyai saluran ekspresi yang sah, maka konflik akan berbentuk antagonisme dengan kekerasan. Dengan adanya penyaluran ekspresi yang sah akan membawa perubahan

bagi mahasiswa dalam menyikapi perubahan serta bagaimana mereka mengelola emosi. Sebab, adanya perbedaan di lingkungan organisasi merupakan hal yang selalu terjadi, apabila mahasiswa tidak mampu untuk mengelolanya menjadi hal yang positif tentu saja akan merugikan mahasiswa ataupun organisasi tersebut.

Selain itu, menurut Mouffe (2016) konflik dalam masyarakat demokratis tidak dapat dan tidak boleh diberantas karena kekhususan demokrasi modern terletak pada pengsayaan dan legitimasi konflik. Hal ini sudah sesuai dengan penelitian yang dilakukan, bahwa di lingkungan BEM FKIP UNS telah mampu menghasilkan mahasiswa yang dapat memahami bahwa setiap orang tidak dipandang sebagai musuh yang harus dihancurkan, namun sebagai musuh yang gagasannya akan diperjuangkan, bahkan dengan sengit, namun haknya untuk mempertahankan gagasan tersebut tidak akan pernah dipertanyakan. Dan adanya perbedaan ide, gagasan, ataupun pendapat tidak dianggap sebagai sebuah situasi yang harus disingkirkan melainkan dijadikan sebagai bagian integral dalam organisasi, sehingga perbedaan itu akan membawa mahasiswa dan organisasi kearah kemajuan.

Adanya keterbukaan terhadap perbedaan berarti memberikan kesempatan dan peluang yang sama

kepada orang lain. Adanya dialog dalam pengambilan keputusan merupakan sebuah sikap yang harus dimiliki oleh warga negara yang memiliki sikap demokratis (Brahma, 2020, hlm. 64). Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengurus dan anggota BEM FKIP UNS memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dimana jumlah pengurus BEM FKIP UNS sejumlah 21 orang dan anggota sejumlah 137. Secara keseluruhan, pengurus dan anggota BEM FKIP UNS memiliki sikap demokratis yang dicerminkan melalui 1) bersikap terbuka atas permasalahan yang dihadapi oleh organisasi tersebut; 2) Bertanggung jawab atas segala yang dilakukan 3) Mau untuk menerima saran dan kritik yang membangun; 4) Bekerja sama dalam menyelesaikan sebuah kegiatan.

Demokrasi agonistik hadir dengan memberikan penghargaan terhadap perbedaan dan memberikan perlindungan terhadap hak individu dan menjamin keikutsertaan mereka dalam berbagai even demokrasi (Sukri, 2016, 162). Penguatan demokrasi agonsitik melalui RHT, LKMM-D, Leadership Training, dan kegiatan kepanitiaan adalah dengan memberikan kesempatan dan memastikan bahwa suasana diskusi selalu terbuka terhadap adanya pendapat yang berbeda. Kemudian mahasiswa memberikan waktu terhadap mahasiswa yang mempunyai pendapat yang berbeda

untuk berbicara, hal ini untuk memastikan bahwa semua suara didengarkan dan dipertimbangkan sebelum keputusan diambil.

Menurut Sobarna (2003, hlm. 41) open-mindedness (keterbukaan pemikiran) merupakan salah satu bentuk kesadaran akan relativitas pengetahuan manusia. Dengan adanya sikap ini maka seseorang tidak akan merasa bahwa pendapatnya sebagai satu-satunya kebenaran. Disini, pengurus dan anggota BEM FKIP UNS telah memiliki sifat kebebasan, yaitu dengan memberikan peluang yang sama kepada setiap orang berpendapat dan menentukan hidupnya. Dengan adanya kebebasan ini, menciptakan keberagaman pemikiran untuk mensukseskan sebuah kegiatan di lingkungan organisasi BEM FKIP UNS. Dengan sikap ini, mereka tidak merasa pendapatnya sebagai satu-satunya kebenaran.

KESIMPULAN

BEM FKIP UNS mengenalkan bahwa konflik dan perbedaan pendapat merupakan sebuah bagian tidak terpisahkan dari demokrasi. dan dapat dijadikan acuan untuk mencapai tujuan organisasi. Langkah-langkah yang diambil adalah dengan menciptakan kontestasi dan perdebatan yang sehat melalui kegiatan-kegiatan di lingkungan organisasi. Kegiatan yang dilakukan

telah memberikan dorongan bagi setiap anggota untuk memberikan kritik, ide, dan saran terhadap kegiatan tersebut, sehingga memunculkan adu argumentasi dari beberapa pihak. Adanya arena di mana konflik dimungkinkan dan perbedaan dapat dihadapi bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada dominasi oleh kelompok atau individu tertentu, sehingga semua pihak memiliki kesempatan yang sama. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan kesempatan berbicara yang adil dan merata, mendukung partisipasi dari anggota yang lain, dan memberikan kebebasan untuk menciptakan perubahan-perubahan. Di sini terdapat pengakuan bahwa ide-ide dari setiap anggota BEM FKIP UNS akan selalu dilawan, namun haknya untuk mempertahankan ide tidak boleh dipertanyakan. Artinya disini mengacu pada dua pihak yang saling bersebrangan, namun pada saat yang sama memberikan pengakuan satu sama lain sebagai pihak-pihak yang masing-masing absah dalam memiliki pandangan.

Hasil dari penguatan demokrasi agonsitik di lingkungan BEM FKIP UNS yaitu mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan diskusi, sehingga mereka lebih berani untuk mengeluarkan pendapat. Mahasiswa berani untuk mengusulkan perubahan dan inovasi yang dianggap perlu untuk kemajuan organisasi, apabila kebiasaan lama telah dianggap kurang efektif atau tidak sesuai dengan tujuan

organisasi. Selanjutnya adalah meningkatnya keterampilan berkomunikasi, public speaking, kepemimpinan, dan berpikir kritis mahasiswa BEM FKIP UNS. Keterampilan-keterampilan ini merupakan perwujudan dari keikutsertaan mahasiswa dalam setiap kegiatan organisasi, seperti pelatihan untuk berbicara di depan umum, belajar berdiskusi, bertanggung jawab dan cara untuk mengelola konflik dengan cara yang melembaga. Di lingkungan BEM FKIP UNS telah mampu menghasilkan mahasiswa yang dapat memahami bahwa setiap orang tidak dipandang sebagai musuh yang harus dihancurkan, namun sebagai musuh yang gagasannya akan diperjuangkan, bahkan dengan sengit, namun haknya untuk mempertahankan gagasan tersebut tidak akan pernah dipertanyakan. Secara keseluruhan, pengurus dan anggota BEM FKIP UNS memiliki sikap demokratis yang dicerminkan melalui 1) Bersikap terbuka atas permasalahan yang dihadapi oleh organisasi tersebut; 2) Bertanggung jawab atas segala yang dilakukan 3) Bersedia menerima saran dan kritik yang membangun; 4) Bekerja sama dalam menyelesaikan sebuah kegiatan. Penguatan demokrasi agonsitik melalui RHT, LKMM-D, Leadership Training, dan kegiatan kepanitiaan adalah dengan memberikan kesempatan dan memastikan bahwa suasana diskusi selalu terbuka terhadap adanya

pendapat yang berbeda. Kemudian mahasiswa memberikan waktu terhadap mahasiswa yang mempunyai pendapat yang berbeda untuk

berbicara, hal ini untuk memastikan bahwa semua suara didengarkan dan dipertimbangkan sebelum keputusan diambil.

DAFTAR PUSTAKA

- Harvey, K. (2012). Democratic Agonism : Conflict and Contestation in Divided Societies. *International Relations*, 1–18. <https://www.e-ir.info/2012/10/20/democratic-agonism-conflict-and-contestation-in-divided-societies/> KATHRYN
- Hidayah, Y., & Sunarso, S. (2018). Penguasaan civic skills aktivis badan eksekutif mahasiswa (studi di Universitas Negeri Yogyakarta). *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 4(2), 153–164. <https://doi.org/10.21831/hsjpi.v4i2.9862>
- Jehalut, F. (2020). Demokrasi Agonistik dan Spirit Baru Pasca-Pilkada Agonistic Democracy and the Postelection New Spirit. *Jap Unwira*, 3(2), 95–106.
- Juru, I. J. (2013). *Dislokasi Wacana Kewarganegaraan Melampaui Liberalisme menuju Wacana Agonistik* (A. Minanto (ed.)). Research Center for Politics and Government Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM.
- Koutsouris, G., Stentiford, L., Benham-Clarke, S., & Hall, D. (2022). Agonism in education: a systematic scoping review and discussion of its educational potential. *Educational Review*, 74(5), 1029–1054. <https://doi.org/10.1080/00131911.2021.1889983>
- Marlina, R. (2021). NILAI-NILAI DEMOKRASI SEBAGAI LANDASAN BERPIKIR KRITIS MAHASISWA. *JAMBURA Journal Civic Education*, 1(2), 61–66.
- Mouffe, C. (2013). *Agonistics: Thinking the World Politically*. Verso.
- Mouffe, C. (2016). Democratic Politics and Conflict: An Agonistic Approach. *Política Común*, 9(20210301), 1–8. <https://doi.org/10.3998/pc.12322227.0009.011>
- Nastiti, D. (2023). Peran organisasi mahasiswa dalam pembentukan sikap demokratis. *Prima Magistra : Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 4, 64–76.
- Strömbom, L., & Bramsen, I. (2022). Agonistic peace: advancing knowledge on institutional dynamics and relational transformation. *Third World Quarterly*, 43(6), 1237–1250. <https://doi.org/10.1080/01436597.2022.2054797>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan* (A. Nuryanto (ed.); Edisi ke-3). Alfabeta.
- Sukri. (2016). Keniscayaan konflik dalam masyarakat demokrasi. *Jurnal Politik Profetik*, 04(2), 153–170. https://www.researchgate.net/publication/318656961_Otoritarianisme_dan_Dukungan_terhadap_Demokrasi_Kajian_Meta_Analisis
- Suryani, I. (2023). POLA KOMUNIKASI ORGANISASI UNTUK MENINGKATKAN SOLIDARITAS DALAM MENGHADAPI KONFLIK INTERNAL DI UPTD SMP NEGERI 2 LIMA PULUH PESISIR Irma Suryani. *Jurnal Al-Manaj*, 3(1), 1–6.
- Zamroni. (2013). *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*. Ombak.